

**PELAKSANAAN PROGRAM SLAMDUNG DALAM PENERBITAN KARTU  
KELUARGA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

Nama Penulis : Elmira Ramadhanti  
NPP. 29.0535

*Asdaf Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung  
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Email: [elmiraramadhanti@gmail.com](mailto:elmiraramadhanti@gmail.com)

**ABSTRACT**

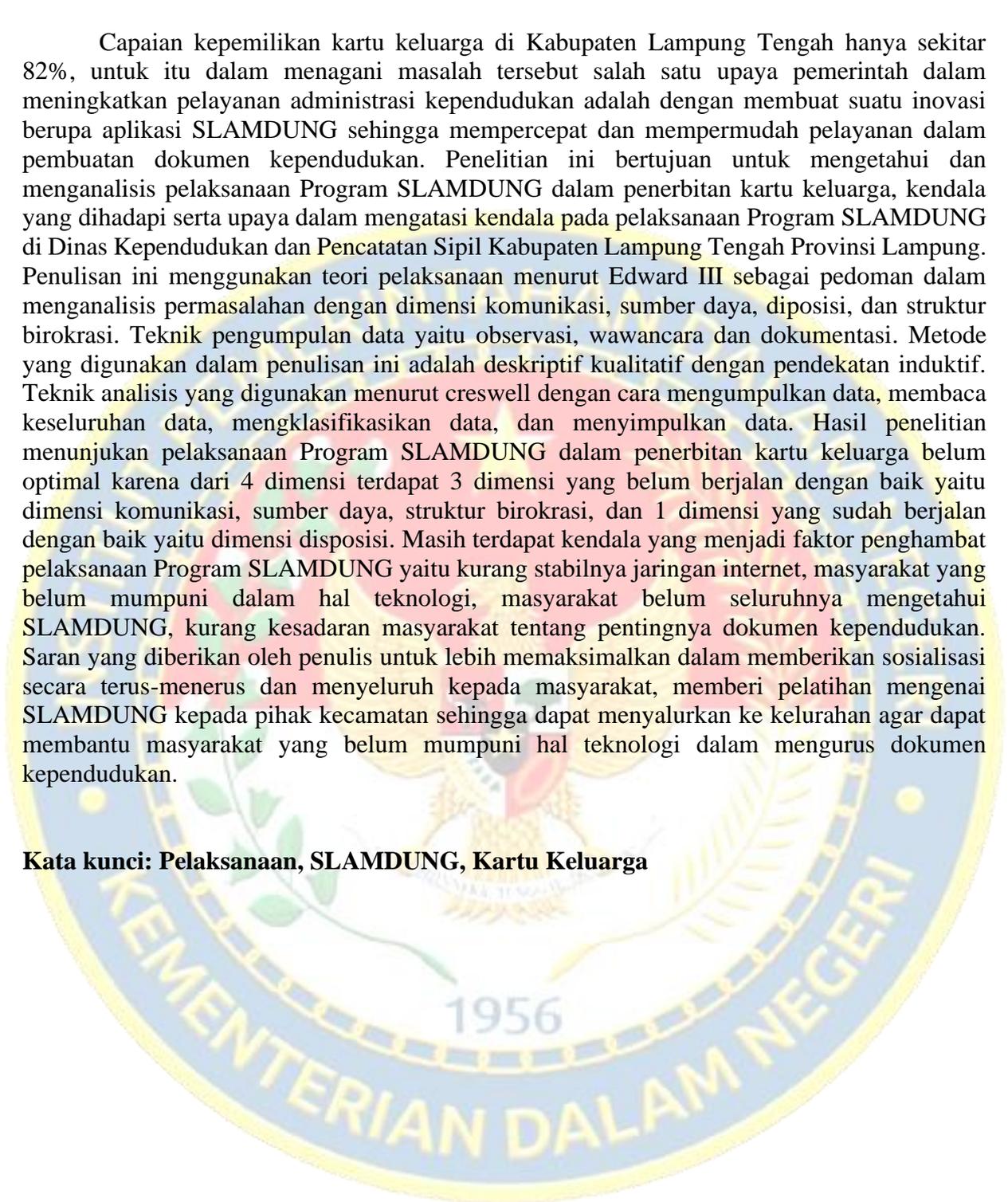
*The achievement of family card ownership in Central Lampung Regency is only about 82%, for that in dealing with this problem one of the government's efforts in improving population administration services is to create an innovation in the form of the SLAMDUNG application so as to speed up and simplify services in making population documents. This study aims to determine and analyze the implementation of the SLAMDUNG Program in issuing family cards, the obstacles faced and efforts to overcome obstacles in the implementation of the SLAMDUNG Program at the Population and Civil Registration Office of Central Lampung Regency, Lampung Province. This writing uses implementation theory according to Edward III as a guide in analyzing problems with the dimensions of communication, resources, position, and bureaucratic structure. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. The method used in this paper is descriptive qualitative with an inductive approach. The analytical technique used according to Creswell is to collect data, read the entire data, classify the data, and conclude the data. The results showed that the implementation of the SLAMDUNG Program in issuing family cards was not optimal because of the 4 dimensions there were 3 dimensions that had not worked well, namely the dimensions of communication, resources, bureaucratic structure, and 1 dimension that had been running well, namely the disposition dimension. There are still obstacles that hinder the implementation of the SLAMDUNG Program, namely the lack of stability of the internet network, people who are not yet qualified in terms of technology, people who do not fully know SLAMDUNG, lack of public awareness about the importance of population documents. The advice given by the author is to maximize in providing continuous and comprehensive socialization to the community, providing training on SLAMDUNG to the sub-district so that it can be distributed to the village so that it can help people who are not technologically qualified in managing population documents.*

**Keywords: Implementation, SLAMDUNG, Family Card**

## ABSTRAK

Capaian kepemilikan kartu keluarga di Kabupaten Lampung Tengah hanya sekitar 82%, untuk itu dalam menangani masalah tersebut salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan adalah dengan membuat suatu inovasi berupa aplikasi SLAMDUNG sehingga mempercepat dan mempermudah pelayanan dalam pembuatan dokumen kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Program SLAMDUNG dalam penerbitan kartu keluarga, kendala yang dihadapi serta upaya dalam mengatasi kendala pada pelaksanaan Program SLAMDUNG di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Penulisan ini menggunakan teori pelaksanaan menurut Edward III sebagai pedoman dalam menganalisis permasalahan dengan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik analisis yang digunakan menurut Creswell dengan cara mengumpulkan data, membaca keseluruhan data, mengklasifikasikan data, dan menyimpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Program SLAMDUNG dalam penerbitan kartu keluarga belum optimal karena dari 4 dimensi terdapat 3 dimensi yang belum berjalan dengan baik yaitu dimensi komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan 1 dimensi yang sudah berjalan dengan baik yaitu dimensi disposisi. Masih terdapat kendala yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Program SLAMDUNG yaitu kurang stabilnya jaringan internet, masyarakat yang belum mumpuni dalam hal teknologi, masyarakat belum seluruhnya mengetahui SLAMDUNG, kurang kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan. Saran yang diberikan oleh penulis untuk lebih memaksimalkan dalam memberikan sosialisasi secara terus-menerus dan menyeluruh kepada masyarakat, memberi pelatihan mengenai SLAMDUNG kepada pihak kecamatan sehingga dapat menyalurkan ke kelurahan agar dapat membantu masyarakat yang belum mumpuni hal teknologi dalam mengurus dokumen kependudukan.

**Kata kunci: Pelaksanaan, SLAMDUNG, Kartu Keluarga**



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia termasuk salah satu negara berkembang dengan laju pertumbuhan penduduk yang cepat sehingga Indonesia menduduki urutan ke-4 populasi penduduk terbanyak di dunia dan menganut sistem demokrasi. Populasi penduduk Indonesia yang sangat banyak menjadi alasan dibutuhkan pengelolaan administrasi kependudukan yang terstruktur dan sistematis mulai dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah. Dinamika penduduk yang berkembang sangat cepat membuat pemerintah selaku penanggung jawab serta penyelenggara urusan administrasi kependudukan terus berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, memenuhi standar teknologi informasi untuk sarana dan prasarana, bersifat dinamis dengan menyesuaikan dengan perubahan zaman.

Setiap warga di Indonesia wajib mendaftarkan dirinya sebagai penduduk Indonesia dan melaporkan setiap peristiwa kependudukannya. Peristiwa kependudukan yang dilaporkan kemudian dituangkan dalam sebuah dokumen kependudukan, salah satunya adalah Kartu Keluarga. Kartu Keluarga merupakan hal yang sangat diperlukan dan memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan karena meyangkut pengakuan identitas sebuah keluarga dan data yang tertera dalam Kartu Keluarga bisa menjelaskan hubungan seseorang dengan keluarganya, yang didalamnya meliputi nama, susunan, hubungan dalam keluarga. Dikatakan sangat penting karena KTP, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian merupakan beberapa pelayanan yang membutuhkan Kartu Keluarga (KK) dalam kepengurusannya. Dalam Kartu Keluarga, terdapat nomor Kartu Keluarga yang berlaku selamanya kecuali apabila kepala keluarganya berubah.

Segala peristiwa kependudukan wajib dilaporkan, namun pada kenyataan di lapangan banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk melaporkan peristiwa kependudukannya, terutama untuk perubahan Kartu Keluarga. Masyarakat masih memiliki pemikiran bahwa untuk memperbarui Kartu Keluarga membutuhkan biaya yang besar dan melalui prosedur yang berbelit-belit. Capaian kepemilikan kartu keluarga di Kabupaten Lampung Tengah hanya sekitar 82%. Kondisi seperti ini merupakan tantangan bagi pemerintah untuk terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat dengan memikirkan strategi-strategi, sehingga masyarakat akan puas terhadap pelayanan yang diberikan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melakukan berbagai upaya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Salah satu upaya tersebut dengan membuat suatu inovasi untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan dalam pembuatan Kartu Keluarga, dimana inovasi itu merupakan suatu program pelayanan administrasi kependudukan berbentuk aplikasi yang dinamakan SLAMDUNG (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Lampung Tengah). Pelayanan dokumen kependudukan untuk masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dengan cara tidak melakukan secara tatap muka.

Program SLAMDUNG ini sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Secara Daring, pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring merupakan sebuah proses pengurusan dokumen kependudukan yang berkas persyaratannya dikirimkan dengan media elektronik yang berbasis *web* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi. Perlu dikaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan administrasi kependudukan secara *online*. Peneliti akan berfokus pada pelaksanaan program SLAMDUNG dalam pelayanan Kartu Keluarga dan apa yang menjadi kendala serta bagaimana upaya yang dilakukan dalam menanggulangi hal tersebut.

## 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang terjadi masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk melaporkan peristiwa kependudukannya, terutama untuk perubahan Kartu Keluarga. Masyarakat masih memiliki pemikiran bahwa untuk memperbarui Kartu Keluarga membutuhkan biaya yang besar dan melalui prosedur yang berbelit-belit. Partisipasi masyarakat untuk penerbitan Kartu Keluarga di Kabupaten Lampung Tengah masih rendah. Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan membuat suatu inovasi untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan dalam pembuatan Kartu Keluarga, dimana inovasi itu merupakan suatu program pelayanan administrasi kependudukan berbentuk aplikasi yang dinamakan SLAMDUNG. Peneliti akan meneliti bagaimana pelaksanaan program SLAMDUNG dalam penerbitan kartu keluarga dan apa yang menjadi kendala serta bagaimana upaya yang dilakukan dalam menanggulangi hal tersebut.

## 1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting dalam membantu penelitian ini sebagai bahan untuk menjadi acuan dalam mengembangkan penulisan serta agar terarah dalam melaksanakan penelitian.

Pertama, penelitian oleh Tania Soraya (2019) dengan judul Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Online di Kabupaten Pati menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan inovasi pelayanan berupa aplikasi memberikan manfaat kepada masyarakat karena tidak perlu mendatangi kantor Disdukcapil, menghemat waktu dan biaya. Namun masih belum optimal dikarenakan masyarakat masih meragukan mengenai kepengurusan administrasi kependudukan secara *online* dalam hal keaslian data. Lalu, adanya kendala seperti terdapat masyarakat Kabupaten Pati tidak bisa memanfaatkan teknologi berupa *gadget* ataupun komputer.

Kedua, penelitian oleh Panji Afandi (2021) dengan judul Efektivitas Sistem Informasi SIMP3AK pada Dinas Pencatatan Sipil Kota Magelang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIMP3AK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang dinyatakan sudah cukup efektif dan efisien, keakuratan data dinilai sudah lebih akurat dibandingkan dengan sistem manual namun masih terdapat kelemahan yaitu kesalahan data penduduk dan kesalahan lainnya yang bersifat teknis.

Ketiga, penelitian oleh Wilia Setiawati (2016) dengan judul Pelaksanaan Kebijakan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan E-government dalam penyelenggaraan pelayanan publik masih belum efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat belum mengikuti prosedur dengan baik, sumber daya finansial yang belum memadai, dan pegawai yang masih melayani dengan melihat suku, agama, serta hubungan keluarga.

## **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baru serta informan yang lebih luas. Penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan program SLAMDUNG dalam penerbitan kartu keluarga. Berbeda dari Tania Soraya, Panji Afandi dan Wilia Setiawati. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian yaitu didasari oleh teori pelaksanaan yang dikemukakan George C. Edward III yang menyatakan bahwa pelaksanaan dapat dipengaruhi oleh empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## **1.5 Tujuan**

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan beberapa tujuan yaitu yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan program SLAMDUNG dalam penerbitan kartu keluarga di Kabupaten Lampung Tengah, kemudian untuk mengetahui apa saja kendala terhadap pelaksanaan program SLAMDUNG, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasinya kendala tersebut.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan pendekatan analisis induktif karena penelitian ini lebih memfokuskan pada menggambarkan atau mendeskripsikan serta menjelaskan peristiwa yang terjadi dilapangan dengan data yang terkumpul berbentuk kata atau gambar, dari data yang diperoleh dikembangkan pola hubungan sehingga memperoleh kesimpulan. Penulis berharap dengan metode kualitatif bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif penulis akan mendeskripsikan sejauh mana kesiapan Aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah terhadap Pelaksanaan Program SLAMDUNG dalam penerbitan Kartu Keluarga.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 11 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Operator Program SLAMDUNG, Tokoh Masyarakat dan beberapa Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pelaksanaan Program SLAMDUNG Dalam Penerbitan Kartu Keluarga**

Penulis menganalisis pelaksanaan program SLAMDUNG dalam penerbitan kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung menggunakan teori pelaksanaan dari George C. Edward III yang terdiri dari 4 dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut:

### 3.1.1 Komunikasi

Teori Edward III menjelaskan bahwa komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menyampaikan perintah agar dapat dilaksanakan dengan baik. Tentu saja komunikasi yang dilakukan harus akurat dan dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Dalam pelaksanaan program SLAMDUNG dimensi komunikasi dilakukan dengan penyaluran informasi melalui sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, menggunakan media cetak seperti banner, poster, dan brosur serta memanfaatkan media online seperti *youtube*, *whatsapp*, *website*, dan lainnya. Namun komunikasi dalam pelaksanaan program SLAMDUNG belum berjalan maksimal dikarenakan masih adanya masyarakat yang belum mengetahui mengenai Program SLAMDUNG, dan masyarakat yang belum mumpuni dalam hal teknologi terkhusus usia lansia.

### 3.1.2 Sumber Daya

Dimensi kedua yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan atau pelaksanaan suatu kebijakan adalah sumber daya. Dalam pelaksanaan aplikasi SLAMDUNG diperlukan adanya sumber daya karena tanpa adanya sumber daya tersebut pelaksanaan pelayanan Aplikasi SLAMDUNG tidak akan berjalan dengan baik, karena sumber daya sebagai obyek yang sangat sentral pada pelaksanaan pelayanan Aplikasi SLAMDUNG dalam pelayanan kependudukan haruslah menjadi tonggak pendorong pelayanan kependudukan berbasis *online*. Dalam pelaksanaan program SLAMDUNG Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah sangat memperhatikan kualitas dari pegawainya sehingga dalam memberikan pelayanan dapat dilakukan dengan maksimal. Kemampuan para pegawai juga sangat diperhatikan dengan diberikannya pelatihan serta dalam hal jumlah pegawai juga sudah memadai untuk melayani permohonan masyarakat setiap harinya. wewenang dijalankan dengan baik dan sesuai pada ketentuan. Apabila terdapat permasalahan penting dan sekiranya bersifat mendesak staf akan bertanya terlebih dahulu kepada pimpinan yang berwenang. Terdapat koordinasi yang baik dari mulai pimpinan paling atas hingga pelaksana perintah. Penghargaan terhadap hierarki masih ada dan tidak ada tumpang tindih wewenang. fasilitas penunjang pelaksanaan cukup memadai dan layak tetapi masih terkendala masalah jaringan. Para pelaksana program juga mendapatkan fasilitas dan perlengkapan yang mereka butuhkan.

### 3.1.3 Disposisi

Menurut Edward III dalam Agustino (2016:139) disposisi atau karakter pelaksana kebijakan merupakan faktor penting ketiga dalam metode pelaksanaan kebijakan publik. Oleh karena itu, personil pelaksana program haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada program yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat dan juga personil pelaksana program harus mempunyai keterampilan sesuai dengan program yang ditetapkan. Apabila para pelaksana mempunyai sikap positif atau mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut maka besar kemungkinan suatu pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Sebaliknya, apabila para pelaksana bersikap menolak terhadap pelaksanaan kebijakan karena konflik kepentingan maka pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan semestinya. Dalam proses keberhasilan pelaksanaan Aplikasi SLAMDUNG dalam penerbitan kartu keluarga adanya disposisi yaitu sikap, komitmen dari para pelaksana, khususnya dari mereka yang menjadi pelaksana program dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah. Dalam dimensi disposisi tiap pegawai ditempatkan pada tiap bidang sesuai dengan keahlian dan SK nya masing-masing dan dalam pelaksanaannya para pegawai memiliki integritas dalam

menjalankan suatu kebijakan yang diberikan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan telah memberikan reward bagi pegawai berprestasi.

### **3.1.4 Struktur Birokrasi**

Struktur Birokrasi merupakan dimensi keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Birokrasi merupakan badan yang secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Struktur birokrasi menjadi penting dalam pelaksanaan aplikasi SLAMDUNG. Karena, birokrasi merupakan suatu hal yang paling sering terlibat dalam pelaksanaan aplikasi SLAMDUNG dalam memberikan dan memajemen pelayanan kepada masyarakat. Dalam dimensi struktur birokrasi masyarakat yang telah berhasil menggunakan SLAMDUNG masih melakukan kesalahan dalam pelaksanaannya seperti mengirim berkas tidak lengkap dan kurang jelasnya foto lampiran yang di *upload* sehingga harus mengirimkan ulang. fragmentasi telah diselenggarakan dengan baik, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah sudah melaksanakan koordinasi dengan Bupati Lampung Tengah terkait dan PT.POS Indonesia adanya inovasi Program SLAMDUNG dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan serta adanya koordinasi yang baik antar stakeholder.

### **3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan program SLAMDUNG dalam penerbitan kartu keluarga di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung ini memberikan dampak positif di berbagai masyarakat dalam rangka mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan sehingga memfasilitasi masyarakat agar bisa tertib administrasi kependudukan terkhusus dalam penerbitan kartu keluarga sehingga mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan lainnya akan tetapi pelaksanaan program tersebut belum berjalan secara optimal karena dari 4 dimensi terdapat 3 dimensi yang belum berjalan dengan baik yaitu dimensi komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan 1 dimensi yang sudah berjalan dengan baik yaitu dimensi disposisi. sama halnya seperti temuan Tania Soraya, 2019. Namun beberapa kendala juga masih ditemui dalam pelaksanaan dari Peranan yang dilakukan yaitu masih banyaknya masyarakat yang acuh tak acuh serta kurang paham mengenai kebijakan dan mekanisme penerbitan Akta Perkawinan ini.

Selain itu, penelitian ini pun berbeda dari temuan Panji Afandi, 2021 dimana penelitian sebelumnya lebih menganalisis tentang efektivitas Sistem Informasi yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kota Magelang. Selanjutnya pelaksanaan program SLAMDUNG dalam penerbitan kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung lebih fokus ke satu dokumen yaitu kertz keluarga dan hanya terkendala jaringan dalam pelaksanaannya tidak seperti temuan Wilia Setiawati (2016) yang meneliti semua dokumen kependudukan dan memiliki kendala dimana sumber daya finansial yang belum memadai, dan pegawai yang masih melayani dengan melihat suku, agama, serta hubungan keluarga.

### 3.3 Diskusi temuan menarik lainnya

Penulis menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan program SLAMDUNG dalam penerbitan kartu keluarga di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung yaitu Kurang stabilnya jaringan internet yang menyebabkan pelayanan pada bagian SLAMDUNG dalam pengurusan dokumen kependudukan tertunda. Tidak semua masyarakat Kabupaten Lampung Tengah sudah mampu menggunakan teknologi, yang menggunakan pelayanan aplikasi SLAMDUNG lebih banyak kaum milenial. masyarakat belum seluruhnya mengetahui program SLAMDUNG, dan masyarakat masih banyak yang kurang kesadarannya terkait pentingnya dokumen kependudukan dan baru akan mengurus apabila yang bersangkutan memiliki keperluan yang mendesak sehingga akan mempersulit dirinya sendiri.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala Pelaksanaan Program SLAMDUNG dalam penerbitan kartu keluarga di Kabupaten Lampung Tengah yaitu berkoordinasi kepada Dinas Komunikasi dan Informasi terkait perkuat dan perluas jaringan secara tepat dan cepat, memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya teknologi komunikasi di masa sekarang ini karena sekarang semua serba menggunakan teknologi untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan salah satunya kepengurusan dokumen kependudukan, dan memberikan sosialisasi serta pemahaman secara terus menerus kepada masyarakat mengenai program SLAMDUNG dan pentingnya mengurus dokumen kependudukan.

## IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan program SLAMDUNG dalam penerbitan kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung masih belum optimal dikarenakan dari 4 dimensi teori pelaksanaan menurut Edward III hanya 1 yang sudah berjalan baik yaitu dimensi Disposisi sedangkan dimensi komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi masih belum berjalan dengan baik. Kendala-kendala dalam pelaksanaannya berupa kurang stabilnya jaringan internet, beberapa masyarakat belum mumpuni dalam hal teknologi, belum sepenuhnya masyarakat mengetahui mengenai aplikasi SLAMDUNG, dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan. Upaya yang dilakukan dalam menangani kendala yang terjadi berupa berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi dalam perkuat jaringan dan memberikan sosialisasi dan pemahaman secara terus menerus dan menyeluruh.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan teori pelaksanaan menurut Edward III.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work):** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pelaksanaan program SLAMDUNG untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU-BUKU**

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Edisi Revisi, Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Adisasmita. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis
- Siswosoediro, Henry S dan Veronica Dian. 2008. *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (Identitas Diri)*. Jakarta: Visimedis.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutabri, Tata. 2012. *Konsep Dasar Informasi*. Yogyakarta: Andi
- Syaukani, Dr. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Utama
- Wahab, Abdul. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Pelaksanaan Kebijakan Negara*. Jakarta: BumiAksara

### **B. KARYA ILMIAH**

- Soraya, Tania. 2019. *Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Online di Kabupaten Pati*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Afandi, Panji. 2021. *Efektivitas Sistem Informasi SIMP3AK pada Dinas Pencatatan Sipil Kota Magelang*. Magelang: Universitas Tidar
- Satiawati, Wilia. 2016. *Pelaksanaan Kebijakan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat*. Manado: Universitas Sam Ratulangi